

PENGARUH DANA DESA, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA LANGSUNG TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2016–2020

Arief Rachman

Universitas Riau

ariefrachman0511@gmail.com

Sri Endang Kornita

Universitas Riau

sriendangkornita@lecturerunri.ac.id

Dahlan Tampubolan

Universitas Riau

dahlantampubolon@lecturerunri.ac.id

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa, pertumbuhan ekonomi dan belanja langsung terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2016–2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis regresi panel. Data panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian ditemukan bahwa Dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 – 2020. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 – 2020. Belanja langsung tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 – 2020, yang mana hasil ini menjelaskan bahwa hipotesis ditolak. Pengalokasian belanja langsung yang tidak hanya digunakan dalam hal mendorong peningkatan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas masyarakat menjadikan belanja modal belum mampu menjelaskan kemiskinan secara parsial pada kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 – 2020

Kata Kunci *Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung, Kemiskinan*

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi problem multidimensional di dalam perekonomian pada banyak negara di dunia. Kemiskinan merupakan kondisi di mana masyarakat tidak saja memiliki tingkat pendapatan rendah, melainkan juga memiliki keterbatasan akses baik itu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan maupun terhadap kegiatan ekonomi yang produktif. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). (Susanti & Sartiyah, 2018).

Persoalan terkait kemiskinan yang membuat seseorang terjebak dalam kondisi yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhannya dijelaskan dalam Teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*) dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan yaitu kondisi keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima, rendahnya pendapatan akan berimplementasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya tabungan dan investasi berakibat keterbelakangan. Dan seterusnya tanpa ada celah untuk keluar dari kondisi tersebut (Kuncoro, 2006).

Lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*) menjelaskan bahwa seseorang tersebut terjebak didalam suatu lingkaran yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat keluar dari situasi tersebut (Kuncoro, 2006). Dalam teori ini, untuk dapat keluar dari kemiskinan

maka perlu memutuskan rantai kemiskinan tersebut. Upaya dalam pemutusan rantai tersebut yang menjadi persoalan yang harus di pecahkan.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera, yang mana kemiskinan menjadi persoalan yang harus dihadapi dan diatasi. Persoalan kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang fokus diatasi di Provinsi Riau hal tersebut terlihat dengan diadakan kegiatan Rakor Percepatan Penanggulangan kemiskinan tahun 2020 yang berlangsung di Ruang Rapat Perlaungan Bappedalitbang. Dimana dalam kegiatan ini memfokuskan penanganan kemiskinan dilakukan dengan strategi yang efektif, efisien dan tepat sasaran dengan melibatkan setiap pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha.

Hal ini menjelaskan bahwa terdapat banyak strategi dilakukan dengan melibatkan berbagai aspek yang ada dimasyarakat sehingga kondisi ini dapat diatasi, selain itu persoalan provinsi tentunya tidak akan teratasi jika daerah dalam provinsi tidak terlibat dalam penanganannya, kondisi kemiskinan di setiap daerah tentunya memiliki perbedaan, hal tersebut terlihat dari kondisi kemiskinan di kabupaten yang terdapat dalam kawasan Provinsi Riau. Untuk lebih jelas berikut ini dapat dilihat perkembangan kemiskinan di Provinsi Riau :

Tabel 1 Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020 (%)

| Kabupaten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kuantan Singingi | 9,85 | 9,97 | 9,92 | 9,56 | 8,91 |
| Indragiri Hulu | 7,15 | 6,94 | 6,30 | 6,06 | 5,96 |
| Indragiri Hilir | 7,99 | 7,70 | 7,05 | 6,54 | 5,93 |
| Pelalawan | 11,00 | 10,25 | 9,73 | 9,62 | 9,16 |
| Siak | 5,52 | 5,80 | 5,44 | 5,03 | 5,09 |
| Kampar | 8,38 | 8,02 | 8,18 | 7,71 | 7,38 |
| Rokan Hulu | 11,05 | 10,91 | 10,95 | 10,53 | 10,31 |
| Bengkalis | 6,82 | 6,85 | 6,22 | 6,27 | 6,40 |
| Rokan Hilir | 7,97 | 7,88 | 7,06 | 7,01 | 6,72 |
| Kepulauan Meranti | 30,89 | 28,99 | 27,79 | 26,93 | 25,28 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau (2021)

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui kondisi kemiskinan di kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, meskipun sebagian kabupaten mengalami penurunan kemiskinan namun di beberapa tahun tertentu justru ada kabupaten yang kemiskinan mengalami peningkatan. Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 mengalami peningkatan kemiskinan dari 9,85% di tahun 2016 menjadi 9,97% di tahun 2017. Begitu juga halnya dengan Kabupaten Siak pada tahun 2016 kemiskinan sebesar 5,52% tetapi di tahun 2017 justru meningkat menjadi 5,80%. Kampar juga demikian di tahun 2018 sebesar 8,18% angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui pengeluaran pemerintah. Adapun pengeluaran pemerintah terutama terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Teori yang menjelaskan hubungan ini adalah Teori Pertumbuhan Endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer, dalam teori Model pertumbuhan endogen menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan perekonomian nasional demi mempromosikan pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2000).

Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya yang berkualitas akan mampu memberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi yang lebih mutakhir sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi.

Kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat daerah, akan tetapi juga menjadi tujuan pembangunan pemerintah pusat, berbagai upaya dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan. Salah satu bentuk kebijakan yang mengendalikan kemiskinan dari lini terkecil suatu negara yaitu program pengalokasian Dana Desa yang mana dana ini bersumber dari APBN yang di alokasikan ke setiap desa – desa di Indonesia.

Terdapat banyak tujuan dari penyaluran dana desa salah satunya dalam pengetasan kemiskinan, desa dituntut untuk dapat menjadi desa yang mandiri dan mendorong pemerataan pembangunan. Jika pembangunan telah merata tentunya ketimpangan pembangunan antar daerah akan terselesaikan. Sehingga untuk mewujudkan terberantasnya kemiskinan melalui program dana desa yang mana tujuan tersebut berlandaskan pada Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan dana desa di Provinsi Riau:

Tabel 2 Dana Desa Kabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020 (Ribu Rp)

| Kabupaten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kuantan Singingi | 85.634.628 | 108.169.870 | 184.890.565 | 131.071.696 | 132.502.452 |
| Indragiri Hulu | 123.119.476 | 156.525.314 | 116.512.391 | 168.394.033 | 174.042.206 |
| Indragiri Hilir | 108.844.866 | 138.490.141 | 138.806.180 | 160.181.885 | 160.181.885 |
| Pelalawan | 151.159.631 | 192.408.524 | 146.388.836 | 209.669.588 | 215.549.310 |
| Siak | 130.621.773 | 166.211.742 | 89.441.056 | 172.266.776 | 177.612.222 |
| Kampar | 66.400.280 | 84.403.526 | 119.456.777 | 104.309.775 | 107.431.208 |
| Rokan Hulu | 102.916.528 | 130.582.811 | 125.915.910 | 143.289.390 | 146.183.545 |
| Bengkalis | 88.205.480 | 112.016.303 | 96.873.113 | 139.861.061 | 144.751.188 |
| Rokan Hilir | 77.108.631 | 97.934.922 | 152.877.498 | 111.240.674 | 115.719.068 |
| Kepulauan Meranti | 65.267.323 | 82.562.772 | 83.526.525 | 96.400.996 | 96.400.996 |

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021)

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwasanya dana desa yang diterima kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 – 2020. Dimana dalam 3 tahun awal sebagian besar mengalami peningkatan meskipun ada juga daerah yang terus mengalami peningkatan penerimaan dana desa tentunya hal ini akan mempengaruhi kondisi kemiskinan di kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Sebagaimana diketahui bahwasanya dana desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan tentunya hal ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhannya akan semakin baik dan terbebas dari kemiskinan.

Tujuan pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi adalah usaha usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Artinya pembangunan ekonomi selain bertujuan menaikkan pendapatan riil juga meningkatkan produktivitas (Todaro & Smith, 2000).

Produktivitas merupakan tujuan yang di harapkan dalam kegiatan perekonomian, sebagaimana diketahui bahwa produktivitas masyarakat di suatu daerah yang mana dengan tingginya produktivitas seseorang maka mendorong meningkatkan taraf hidup seseorang. Produktivitas merupakan masalah yang mendorong terjadinya kemiskinan. (Kuncoro, 2006).

Menurut Todaro & Smith (2000), terjadinya kemiskinan salah satu faktor penyebab nya adalah kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang lambat, selain itu Kuznet mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk dan pada tahap selanjutnya cenderung membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas pendapatan yang akhirnya pada suatu titik tertentu akan menurun kembali. Kuznet juga mengatakan pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena

pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir jumlah penduduk miskin berangsur-angsur mulai berkurang (Kuncoro, 2006).

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan menjelaskan perekonomian semakin membaik dengan demikian kemampuan masyarakat dari segi pendapatan juga mengalami peningkatan sehingga masyarakat memiliki kualifikasi tidak sebagai penduduk miskin. Pentingnya peran pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi kemiskinan ialah melihat ukuran dari keberhasilan ekonomi salah satunya dinilai dari besaran pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat menciptakan kesejahteraan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi tentunya tergantung dari kondisi PDRB yang dimiliki, sebagaimana diketahui bahwa yang dikatakan dengan Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan PDRB kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020 :

Tabel 3 Perkembangan PDRB Menurut Kabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2016 – 2020 (Juta Rp)

| Kabupaten/Kota | PDRB ADHB KabKota (Milyar Rupiah) | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kuantan Singingi | 27521.70 | 29504.32 | 30463.63 | 31869.96 | 33748.58 |
| Indragiri Hulu | 37033.14 | 38726.75 | 40386.22 | 41592.73 | 42511.32 |
| Indragiri Hilir | 57291.70 | 60870.71 | 60180.01 | 62697.91 | 65014.31 |
| Pelalawan | 41164.87 | 43840.64 | 46073.49 | 47732.02 | 50681.06 |
| Siak | 78941.93 | 79593.52 | 84262.91 | 82105.13 | 77038.22 |
| Kampar | 69676.25 | 71571.02 | 77152.93 | 77267.15 | 73076.31 |
| Rokan Hulu | 29145.61 | 30992.30 | 32290.19 | 33882.26 | 36087.00 |
| Bengkalis | 132200.50 | 132978.17 | 148603.30 | 140378.91 | 114583.70 |
| Rokan Hilir | 73268.03 | 73997.26 | 78620.93 | 74588.12 | 67948.12 |
| Kepulauan Meranti | 16044.10 | 16725.88 | 18163.64 | 18394.55 | 18066.19 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau (2021)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat perkembangan PDRB kabupaten di Provinsi Riau, sebagaimana diketahui bahwa dari 10 kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau diketahui bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dengan PDRB tertinggi yaitu sebesar Rp114.583,70 milyaran. Jika diihat secara menyeluruh sebagian besar PDRB kabupaten di Provinsi Riau cenderung menurun di tahun 2020 seperti Siak, Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kabupaten Meranti sedangkan yang lainnya justru mengalami peningkatan.

PDRB ialah kondisi yang menggambarkan perekonomian, dimana pada saat PDRB mengalami peningkatan maka mengisyaratkan bahwa perekonomian meningkat sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan juga mengalami peningkatan. Dengan demikian hal tersebut akan menekan kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan kondisi PDRB akan mempengaruhi kemiskinan.

Selain itu, pemerintah daerah melalui alokasi belanja daerah juga memiliki tujuan untuk dapat mendorong penurunan kemiskinan, semakin meningkat jumlah belanja daerah yang miliki daerah maka kemampuan daerah dalam pengetasan kemiskinan akan semakin meningkat. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2000), bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh salah satunya tingkat pendapatan rata-rata daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatannya maka potensi untuk mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan masalah kemiskinan juga semakin besar. Namun alokasi tersebut tentu harus tepat sasaran, jika

tidak justru akan menyebabkan kemiskinan akan semakin memburuk dan akan menghasilkan kekacauan sosial (*social chaos*).

Belanja daerah salah satunya yaitu belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Dalam Kebijakan fiskal bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yaitu perpajakan (*tax policy*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) (Mankiw,2003).

Semakin meningkatnya belanja langsung maka akan semakin meningkat keterlibatan pemerintah melalui pengeluarannya yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup dan penerimaan masyarakat melalui berbagai program yang dapat memicu penghasilan. Seperti dalam belanja modal maka akan mendorong peningkatan sarana dan prasarana serta dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat dari rangkaian kegiatan yang dilakukan.

Terlebihi dahulu dapat dilihat perkembangan belanja langsung kabupaten di Provinsi Riau :

Tabel 4 Perkembangan Belanja Langsung Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2016 - 2020

| Kabupaten | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kuantan Singingi | 417.924.798 | 490.515.538 | 491.183.454 | 636.800.338 | 502.921.814 |
| Indragiri Hulu | 692.744.310 | 685.630.133 | 567.434.887 | 789.311.151 | 535.217.179 |
| Indragiri Hilir | 833.854.913 | 980.382.787 | 797.844.670 | 913.990.655 | 1.166.563.608 |
| Pelalawan | 921.046.975 | 754.393.918 | 607.350.021 | 754.898.819 | 771.706.158 |
| Siak | 856.731.289 | 787.914.978 | 777.383.769 | 1.097.446.819 | 1.134.342.220 |
| Kampar | 916.230.710 | 963.924.529 | 861.489.847 | 1.281.025.947 | 1.271.056.253 |
| Rokan Hulu | 633.228.040 | 794.008.688 | 797.816.866 | 883.653.692 | 609.040.863 |
| Bengkalis | 1.643.876.065 | 1.882.232.784 | 1.790.237.407 | 2.149.729.584 | 1.359.860.174 |
| Rokan Hilir | 1.002.578.372 | 1.882.232.784 | 719.053.983 | 964.612.920 | 1.143.268.172 |
| Kepulauan Meranti | 544.407.100 | 505.084.963 | 527.783.829 | 709.219.917 | 778.530.807 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau (2021)

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat perkembangan belanja langsung kabupaten di Provinsi Riau, dimana dari 10 kabupaten yang memiliki belanja langsung tertinggi yaitu Kabupaten Bengkalis meskipun besarnya mengalami fluktuatif akan tetapi angkanya masih lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sedangkan belanja langsung terendah yaitu Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat beberapa indikator yang mempengaruhi pergerakan kemiskinan diantaranya dana desa yang merupakan salah satu program yang salah satu tujuannya untuk pengetasan kemiskinan, sehingga penulis merasa perlu melakukan kajian kepada daerah yang menerima aliran dana desa di Provinsi Riau. Sebagaimana diketahui bahwa daerah yang menerima dana desa hanya daerah dengan kriteria desa yang tersebar di kabupaten – kabupaten salah satunya di Provinsi Riau yang terdiri dari 10 kabupaten.

Kajian terdahulu terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Daforsa dan Handra (2019), penelitian ini mengkaji pengaruh pengelolaan dana desa terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Selain itu penelitian ini hanya menganalisis variabel dana desa tetapi penulis dalam penelitian ini menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja langsung.

Ebunoluwa dan Yusuf (2018) meneliti tentang *Effects of Economic Growth on Poverty Reduction In Nigeria* yang mana penelitian melihat pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan, yang membedakan dengan penelitian ini penambahan variabel dana desa serta lokasi penelitian yang berbeda.

Selain itu Ishak (2017), meneliti tentang pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan, yang mana pada penelitian ini hanya membahas belanja saja sedangkan penulis menambahkan variabel dana desa dan pertumbuhan ekonomi dalam mempengaruhi kemiskinan, selain itu penggunaan alat analisis juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah dana desa berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 - 2020?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 - 2020?
3. Apakah belanja langsung berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 - 2020?

II. LANDASAN TEORI

A. 1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan (Suryawati, 2004).

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan (Suryawati, 2004).

Masalah Ekonomi menyangkut masalah kerumahtanggaan penduduk dalam memenuhi kebutuhan materinya. Masalah ini terbagi kedalam beberapa aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas penduduk, sumber daya alam dan manusia, komunikasi dan transportasi, kondisi dan lokasi geografi. Ditinjau dari segi kuantitas Penduduk Indonesia merupakan penduduk yang memiliki kekuatan ekonomi yang bisa dikembangkan terutama dengan jumlah penduduk yang banyak. Tapi kemiskinan menjadikan penduduk tidak memiliki kekuatan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Kemudian kemiskinan menjadikan penduduk seolah menunjukkan kelemahannya sebagai konsumen berbagai produksi.

a. Aspek Lingkungan

Masalah lingkungan dapat diartikan bahwa masalah yang terjadi di lingkungan hidup manusia mengancam ketentraman dan kesejahteraan manusia yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara komponen manusia dengan lingkungan yang menjadi penampung dan penjamin kehidupan manusia. Dampak lainnya yaitu keterbelakangan pembangunan, kebodohan, kebanjiran, pencemaran lingkungan dan tingkat kesehatan yang rendah yang diakibatkan karena lingkungan yang kurang mendukung karena kemiskinan.

b. Aspek Pendidikan

Pendidikan secara luas merupakan dasar pembentukan kepribadian, kemajuan ilmu, kemajuan teknologi dan kemajuan kehidupan sosial pada umumnya. Dampak kemiskinan terhadap pendidikan memang sangat merugikan sekali karena telah menghilangkan pentingnya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tidak sedikit penduduk Indonesia yang belum mengenal pendidikan.

c. Pemberontakan

Pemberontakan merupakan bentuk kekecewaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyatnya, perang saudara antar-etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan yang

lainnya. Semua itu tidak terlepas dari usaha masyarakat untuk melakukan perubahan nasibnya agar menjadi lebih baik (sejahtera) dari keadaan kemiskinan yang menimpanya. Pemberontakan seperti itu biasanya terjadi di negara berkembang atau negara miskin.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu bentuk perhitungan untuk yang bertujuan untuk menjelaskan perubahan perkenomian dari perbandingan tahun tertentu yang terus berkembang (Sukirno, 2013). Dengan adanya peningkatan jumlah PDB/PNB tidak tergantung kepada perubahan pertumbuhan penduduk, kondisi pada struktur ekonomi serta perbaikan sistem kelembagaan yang mengalami perubahan ataupun tidak hal tersebut merupakan gambaran dari kondisi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mankiw (2006), "PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Ada dua pendekatan untuk melihat besaran PDB, pertama melihat PDB sebagai pendapatan total dari setiap orang di dalam perekonomian". Selain itu, dalam menentukan nilai PDB dapat diketahui berdasarkan total pengeluaran total dalam kegiatan perekonomian.

Menurut BPS (2022), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu (setahun) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah, ada dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan:

- 1) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah.
- 2) PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran (BPS, 2022):

- 1) Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- 2) Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
- 3) Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok dan (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 241 tahun 2014 pasal 1 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan

geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

3. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 241 tahun 2014 pasal 1 tentang pelaksanaan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, adapun hal yang mendukung pemilihan lokasi penelitian ini adalah kemiskinan Provinsi Riau masuk kedalam 5 terendah di Pulau Sumatera. Selain itu, penelitian ini difokuskan kepada kabupaten di Provinsi Riau hal tersebut karena dana desa hanya dialirkan kepada daerah kabupaten. Penelitian ini menggunakan data *time series* dan *cross section* yaitu data kabupaten di Provinsi Riau dari tahun 2016 – 2020.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data menggunakan analisis regresi panel dengan program EViews10. Data panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Regresi Data Panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu (Basuki & Prawoto, 2017).

Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model *time series* seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit *cross section* yang diabaikan dalam pemodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit *cross section* (Basuki & Prawoto, 2017). Tidak seperti regresi biasanya, regresi data panel harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat. Berikut diagram tahapan dari regresi data panel (Basuki & Prawoto, 2017).

IV. HASIL PENELITIAN

Uji Chow

Chow test yakni pengujian untuk menentukan *fixed effect model* atau *random effect model* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah :

- a. H_0 yaitu *common effect model*
- b. H_1 *Fixed effect model*

Dasar penolakan untuk hipotesis diatas adalah dengan membandngkan perhitungan nilai prob F dengan 0,05 dan 0,10. Perbandingan dipakai apabila nilai prob F kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak berarti model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect model*. Untuk lebih jelas berikut ini dapat dilihat uji chow :

Tabel 3 Uji Chow

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Cross-section F | 114.355132 | (9,37) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 168.046736 | 9 | 0.0000 |

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Dari hasil uji Chow yang dilakukan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0000. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ sehingga pada uji tersebut model yang diterima adalah *fixed effect model*. Selanjutnya dilakukan pengujian dengan Uji Hausman untuk menguji antara *fixed effect model* dan *random effect model*.

Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan apabila hasil pengujian pada *chow test* menerima H_1 , yaitu model *fixed effect model* yang kemudian akan dibandingkan dengan model *random effect model*. Keputusan diambil berdasarkan pemenuhan pada salah satu pernyataan dibawah ini :

1. Menerima H_0 jika Uji Hausman nilai probabilitasnya $> \alpha 5\%$ atau (0,05)
2. Menerima H_1 jika Uji Hausman nilai probabilitasnya $< \alpha 5\%$ atau 0,05

Jika H_0 diterima maka *random effect model* yang digunakan sedangkan jika H_1 diterima maka *fixed effect model* yang digunakan.

Tabel 4 Uji Hausman Test

| Test cross-section random effects | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
| Cross-section random | 14.883543 | 3 | 0.0019 |

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa nilai prob kecil dari 0,05 yaitu 0,0019 menunjukkan kondisi menolak H_0 dan menerima H_1 . Dalam hal ini H_1 nya adalah *fixed effect model* lebih baik dibandingkan dengan model *random effect model*, maka dalam keyakinan 95% dapat disimpulkan bahwa untuk data menggunakan *fixed effect model*.

Uji Statistik

Uji statistic ialah uji yang dapat melihat ketetapan model berdsarkan beberapa uji diantaranya parsial (uji t), uji simultan (uji f), serta juga menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel dependennya (R^2):

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau nilai Adjusted R-square ialah untuk melihat seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi Berlaku (R²)

| Cross-section fixed (dummy variables) | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.991310 | Mean dependent var | 9.899400 |
| Adjusted R-squared | 0.988491 | S.D. dependent var | 6.351479 |
| S.E. of regression | 0.681382 | Akaike info criterion | 2.289507 |
| Sum squared resid | 17.17840 | Schwarz criterion | 2.786633 |
| Log likelihood | -44.23767 | Hannan-Quinn criter. | 2.478815 |
| F-statistic | 351.7168 | Durbin-Watson stat | 1.087302 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik atau seberapa besar sumbangannya terhadap variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan *Adjusted R-squared* pada tabel 5 diperoleh angka sebesar 0.988491. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 98,8491%, hal ini menunjukkan variabel independen mampu berkontribusi menjelaskan variabel dependen sebesar 98,8613%, sedangkan sisanya sebesar 1,1509% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model.

2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara serempak dapat diketahui menggunakan uji simultan atau uji F. pada saat nilai probabilitas signifikansi (sig) F memiliki angka yang kecil dari 0,05.

Tabel 6 Uji Simultan (Uji Statistik F) Berlaku

| Cross-section fixed (dummy variables) | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.991310 | Mean dependent var | 9.899400 |
| Adjusted R-squared | 0.988491 | S.D. dependent var | 6.351479 |
| S.E. of regression | 0.681382 | Akaike info criterion | 2.289507 |
| Sum squared resid | 17.17840 | Schwarz criterion | 2.786633 |
| Log likelihood | -44.23767 | Hannan-Quinn criter. | 2.478815 |
| F-statistic | 351.7168 | Durbin-Watson stat | 1.087302 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Berdasarkan hasil analisis Tabel 6 diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0,000000. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F dinyatakan signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu dana desa pertumbuhan ekonomi dan belanja langsung secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau.

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas (dana desa, pertumbuhan Ekonomi dan belanja langsung) terhadap variabel terikat (kemiskinan). Apabila nilai prob t < tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji parsial (Uji t) dapat dilihat dari table 5.5 sebagai berikut.

Tabel 7 Uji Parsial (Uji Statistik t) Berlaku

| Variable | Prob. |
|----------|--------|
| X1? | 0.0411 |
| X2? | 0.0047 |
| X3? | 0.3921 |

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Analisis uji parsial menunjukkan hasil yang dijelaskan berikut ini:

1. Dana Desa (X_1)
Dana desa diketahui terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, hal tersebut terlihat dari nilai signifikan 0.0411, yang artinya nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial dana desa mempengaruhi kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau.
2. Pertumbuhan Ekonomi (X_2)
Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai signifikan 0,0047, yang artinya nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau, artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kemiskinan.
3. Belanja Langsung (X_3)
Belanja langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau, hal tersebut karena nilai signifikan 0,3921, yang artinya nilai ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Sehingga secara parsial belanja langsung tidak mempengaruhi kemiskinan kabupaten di Riau.

4. Analisis Regresi Panel

Analisis data panel pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa, pertumbuhan ekonomi dan belanja langsung terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016-2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan regresi panel dengan *fixed effect model* hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing kabupaten di Provinsi Riau dengan variabel penjelas (dana desa, pertumbuhan ekonomi dan belanja langsung) terhadap kemiskinan dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Berdasarkan hasil regresi data panel diperoleh persamaan sebagai berikut.

Tabel 8 Analisis Regresi Panel Berlaku

| Variable | Coefficient |
|----------|-------------|
| C | 98.33757 |
| X1? | -1.132492 |
| X2? | -5.290562 |
| X3? | -0.487568 |

Sumber: Data Olahan Eviews, 2021

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat hasil analisis regresi panel, yang mana persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 98.33757 - 1.132492X_1 - 5.290562X_2 - 0.487568X_3$$

1. Koefisien Konstanta
Menunjukkan konstanta sebesar 98.33757. Hal ini berarti semua variabel independen (dana desa, pertumbuhan ekonomi dan belanja langsung) diasumsikan bernilai tetap, maka dapat dikatakan bahwa Y (kemiskinan) sebesar 98.33757%.
2. Koefisien Dana Desa (X_1)
Dari persamaan regresi dapat diketahui variabel dana desa menunjukkan nilai koefisien sebesar -1.132492, pada saat dana desa meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan

mengalami penurunan sebesar 1.132492% dan variabel lain di anggap tetap, dan sebaliknya.

3. Koefisien Pertumbuhan Ekonomi (X_2)

Dari persamaan regresi dapat diketahui koefisien variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien sebesar -5.290562 yang artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 5.290562% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

4. Koefisien Belanja Langsung (X_3)

Dari persamaan regresi dapat diketahui koefisien variabel belanja langsung menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.487568 yang artinya jika belanja langsung meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.487568% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Namun karena secara parsial tidak ditemukan pengaruh antara belanja langsung terhadap kemiskinan maka hasil tidak dapat di interpretasikan.

Pembahasan

Dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah diharapkan memberikan perubahan yang berarti pada ekonomi dan pembangunan di desa. Penggunaan Dana Desa dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Adapun peruntukan Dana Desa adalah 1) Bidang Pembangunan Desa, 2) Bidang Pembangunan Ekonomi, 3) Bidang Pembangunan Sosial, dan 4) Bidang Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Anwar, Heriyanto, & Tampubolon, 2018).

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa yaitu a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Hasil kajian yang dilakukan oleh (Anwar, Heriyanto, & Tampubolon, 2018) menjelaskan bahwa dalam perlunya swakelola dana desa yang bertujuan untuk menompang kelembagaan petani melalui regulasi pemerintah yang dapat mengintegrasikan lembaga-lembaga dan menjamin proses kebijakan dan pendanaan program penataan lembaga petani. Program ini diarahkan kepada tiga hal: aturan main lokal, lembaga-lembaga sosial petani dan peningkatan kapasitas sumber daya petani, ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian rupa secara berkelanjutan. Beberapa langkah inilah diharapkan akan membangun tindakan kolektif para aktor dalam mendesentralisasikan kuasa kepada petani dalam membuka akses ke proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Dana desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah diharapkan memberikan perubahan yang berarti pada ekonomi dan pembangunan di desa. Penggunaan Dana Desa dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Adapun peruntukan Dana Desa adalah 1) Bidang Pembangunan Desa, 2) Bidang Pembangunan Ekonomi, 3) Bidang Pembangunan Sosial, dan 4) Bidang Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Anwar, Heriyanto, & Tampubolon, 2018).

Tampubolon (2018) mengatakan bahwa perlunya memperhatikan hal – hal tertentu dalam pengambilan seperti: (1) memberikan pola pemahaman yang berbeda pada khalayak sasaran yang memiliki latar belakang berbeda pada sisi pendidikan; (2) memperpanjang waktu pendampingan sehingga dokumen perencanaan secara rinci dapat diselesaikan sampai peraturan desa terwujud; dan (3) mengurangi dominasi dari salah satu pihak dengan strategi dan cara tertentu sehingga obyektifitas hasil dapat tercapai. Hal tersebut seperti hasil kajian yang dilakukan oleh (Darmawansyah, Syapsan, & Tampubolon, 2021), menjelaskan bahwasanya penggunaan Dana Desa bidang pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa yaitu a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha

milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Seperti yang dijelaskan oleh Tampubolon, Zamaya, Misdawita, dan Handoko (2021), Pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) bertujuan meningkatkan kemandirian dan memperkuat perekonomian kampung serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Pendirian BUMKam merupakan upaya kampung mengurangi intervensi pemerintah untuk mendorong inovasi masyarakat kampung dalam menggerakkan ekonominya.

Pada penelitian ini menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau, adapun ukuran yang digunakan ialah PDRB atas harga berlaku dan harga konstan mengingat fungsi berbeda pengukuran atas kedua harga tersebut. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwasanya Pertumbuhan ekonomi menggunakan ukuran PDRB atas dasar harga berlaku memiliki nilai signifikan 0,0047, yang artinya nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Sehingga dapat disimpulkan Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau, artinya setiap peningkatan Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kemiskinan. diketahui koefisien variabel Pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien sebesar sebesar -5.290562 yang artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 5.290562% dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Hasil penelitian yang menunjukkan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan hal ini menjelaskan bahwasanya perlunya mendorong peningkatan Pertumbuhan ekonomi sehingga kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat dapat keluar dari garis kemiskinan. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Namun yang menjadi persoalan seringkali masyarakat masih memiliki produktivitas yang rendah, selain itu pada saat ini perekonomian di Provinsi Riau masih didominasi oleh sektor primer sehingga hal tersebut menjelaskan masyarakat masih bekerja pada sektor primer sedangkan diharapkan masyarakat dapat berkembang menuju sektor sekunder ataupun tersier yaitu sektor industry dan jasa.

Selain itu berbagai hal dapat dilakukan yang bersumber dari belanja daerah, seperti yang dijelaskan oleh bahwasanya belanja daerah dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan tentunya hal tersebut sangat tergantung kepada peran pemerintah dalam mengakomodir domain sosial, ekonomi, budaya dalam proses pemberdayaan masyarakat, domain politik. Distribusi penggunaan belanja desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat akan digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Tampubolon & Mardiana, 2022).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, Susilowati, & Hadi, (2017), yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupate/Kota. Begitu juga halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaat, Kindangen, & Rotinsulu, (2017) menjelaskan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan kejadian kemiskinan juga ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ebunoluw & Wasiu Yusuf (2018). Namun, hasil penelitian ini justru berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Utama (2019), bahwasanya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

V. KESIMPULAN

Dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 – 2020. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 – 2020. Belanja langsung tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 – 2020, yang mana hasil ini menjelaskan bahwa hipotesis ditolak. Pengalokasian belanja langsung yang tidak hanya digunakan dalam hal mendorong peningkatan sarana dan prasarana peningkatan

produktivitas masyarakat menjadikan belanja modal belum mampu menjelaskan kemiskinan secara parsial pada kabupaten di Provinsi Riau tahun 2016 – 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Heriyanto, M., & Tampubolon, D. (2018). Strategi Politik dalam Penataan Lembaga Petani di Desa Rambah Muda, Riau. *SOROT: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 13(1) , 37-52
DOI: <https://doi.org/10.31258/sorot.13.1.5366>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daforsa, F., & Handra, H. (2019). Analysis Of Village Fund Management In Poverty Alleviation At Pasaman Regency, West Sumatra. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 6(6) , 717-728. DOI: <https://doi.org/10.22437/ppd.v6i6.6817>
- Darmawansyah, R., Syapsan, & Tampubolon, D. (2021). Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management* 1(3) , 511-530 Doi : 10.53363/buss.v1i3.27.
- Ebunoluwa, O. O., & Yusuf, W. A. (2018). Effects of Economic Growth on Poverty Reduction In Nigeria. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 9(5) , 25-29. DOI: 10.9790/5933-0905012529
- Ishak, J. F. (2017). Dalam bentuk belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 17(1) , 55-59.
DOI: <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v17i1.212>
- Kaat, M. H., Kindangen, P., & Rotinsulu, D. C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010–2015. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 18 (6) , 1-18.
DOI: <https://doi.org/10.35794/jpekd.16458.19.3.2017>
- Kuncoro, M. (2006). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mankiw, N. G. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pratama, N. R., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 8(7) , 651-680.
DOI: <https://doi.org/10.24843/EEB.2019.v08.i07.p01>
- Susanti, E. N., & Sartiyah. (2018). Determinan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau. *Dimensi* 8 (2) , 249-265. DOI: [10.33373/dms.v8i2.2156](https://doi.org/10.33373/dms.v8i2.2156)
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Upp. Amp Ykpn.
- Tampubolon, D. (2018). Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Revisi Rppm Desa Kepenghuluan Bantaian Dan Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2018* (pp. 380-385). Riau: Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau.
- Tampubolon, D., & Mardiana. (2022). Kebijakan Belanja Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial* 11 , 1-16.
- Tampubolon, D., Zamaya, Y., Misdawita, & Handoko, T. (2021). Penguatan Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2) , 107-113
DOI: <https://doi.org/10.24114/jpkm.v27i2.23646>.
- Todaro, M. P., & Smith. (2000). *2000, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.